

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG

**Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P,
Eka Yulyana, SIP, M.Si, M.AP,
Rachmat Ramdani, S.IP
Email : purnamasari.hanny@gmail.com**

Abstrak

Keberadaan BUM Desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Desa Warung Bambu adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang telah memiliki BUM Desa namun selama ini belum mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desanya.

Kata kunci : Efektivitas, BUM Desa, Desa Warungbambu

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa, diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Warung Bambu yang masih rendah karena masyarakat Desa Warung Bambu rata-rata bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh dan pedagang diharapkan keberadaan BUM Desa mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Tidak berjalannya Bumdes Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan BUM Desa.
- 3) Pemerintah Desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUM Desa.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pencapaian tujuan dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang?
- 2) Bagaimana integrasi dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang?
- 3) Bagaimana adaptasi dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

- 2) Untuk mengetahui integrasi dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
- 3) Untuk adaptasi dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson (Handayani, 1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dalam dunia bisnis.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiono, 2014:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiono, 2014:231) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

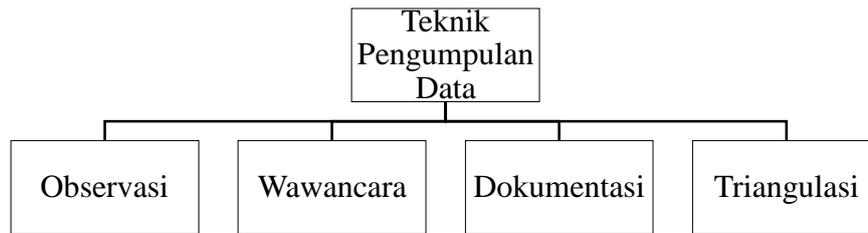
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ini mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014 : 240) studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan hukum-hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

4. Triangulasi

Pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.



Sumber : Sugiono (2014:225)

Gambar 1.2

Teknik Pengeumpulan Data

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pencapaian tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam pengelolaan badan usaha milik desa berbasis kerakyatan masyarakat desa upaya mewujudkan pencapaian tujuan dalam organisasi maka masyarakat desa juga diperlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas mengerti dan pahami aturan-aturan dan manajemen pengelolaan, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sekretaris Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Bapak Rohman beliau mengatakan bahwa :

“Bahwa masyarakat kita belum memahami secara betul fungsi dari bumdes itu sehingga anggapan mereka dengan adanya bumdes simpan pinjam sama halnya dengan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah desa mereka tidak mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pengelola bumdes, untuk kedepannya pengelolaan bumdes akan memberikan bantuan langsung kepada bidang kesehatan, pendidikan”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)

Sumber daya manusia merupakan bagian hal yang terpenting bagi efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa berbasis kerakyatan masyarakat desa Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dalam pencapaian tujuan, organisasi harus mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif

terbaik guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Kemudian apakah pengelolaan badan usaha milik desa. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Bapak Rohman beliau mengatakan :

“Pada awal berdirinya bumdes di desa warungbambu memiliki sasaran dan tujuan yaitu ingin menghilangkan ketergantungan dan kebiasaan masyarakat desa terhadap bank keliling yang akan mejerumuskan ekonomi masyarakat, program bumdes pertama kali berdiri sasaran dan tujuan simpanan pinjaman untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat desa pinjaman pada bank keliling”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUM Desa berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUM Desa.

Dalam proses integrasi membutuhkan komunikasi secara akurat yang diterima oleh organisasi lainya karena harus ada kesamaan tujuan sehingga mampu membangun komunikasi dengan baik. Kegiatan BUM Desa sebagai kegiatan yang berawal dari inisiatif dari masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Kemudian apakah kegiatan bumdes di Desa Warungbambu melakukan sosialisasi untuk membuat suatu forum masyarakat untuk memusyawarakan pembentukan dan perencanaan bumdes, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Warungbambu Dadang Sonjaya beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum saya menjadi kepala Desa Warungbambu pada saat pertama kali pembentukan bumdes saya sebagai kepala dusun awal pembentukan BUM Desa ada forum musyawarah yang dihadiri oleh kepala dusun yang ada di wilayah Desa Warungbambu”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)

Komunikasi merupakan bagian hal yang terpenting bagi Pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa sebagai upaya mewujudkan menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa

masyarakat desa apakah yang terlibat dalam pembentukan badan usaha milik desa menjunjung tinggi rasa persatuan antara kepala dusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa beliau Bapak Rohman mengatakan bahwa :

“Pada awalnya mereka sepakat dengan hasil forum pembentukan badan usaha milik desa, namun berjalannya waktu berbagai permasalahan muncul di tengah-tengah masyarakat dengan adanya pembangunan perumahan dan adanya perusahaan di wilayah desa sehingga memunculkan kecemburuan bagi dusun yang tidak memiliki potensi di wilayahnya”. (Kantor Desa Warungbambu,, 25 Juli 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat integrasi dalam efektivitas pengelolaan BUM Desa berbasis ekonomi kerakyatan masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari pemerintah dan masyarakat membentuk forum musyawarah untuk membentuk BUM Desa tetapi terbatas kepada Kepala Dusun tidak melibatkan secara luas masyarakat desa. Masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas tahapan-tahapan dalam pembentukan BUM Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUM Desa menimbulkan konflik baru dan disintegrasi di tengah masyarakat.

Pengelolaan Bumdes Desa Warungbambu apakah pemerintah desa dan masyarakat desa mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pembentukan BUM Desa, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa warungbambu Bapak Rohman beliau mengatakan bahwa :

“Kemampuan menyesuaikan dengan pembentukan bumdes ini masih menjadi kelemahan di desa ini karena kita tidak memiliki kemampuan yang memadai seperti manajemen dan akuntansi untuk mengelola BUM Desa dan juga kita kurang didukung oleh sarana yang memadai juga”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa dengan Bapak Debleng beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat desa kita memang belum mampu menyesuaikan dengan pengelolaan bumdes salah satu faktornya adalah masih rendah pendidikan masyarakat desa mereka ketakutan kita mengelola bumds berupa simpan pinjam pada awal berdiri sampai diberhentikan kelemahannya adalah manajemen pengelolaan”. (Desa Warungbambu, 26 Juli 2016)

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan didukung pula oleh sarana dan prasarana. Terciptanya keterpaduan antara kemampuan masyarakat dengan kebijakan pembentukan BUM Desa merupakan hubungan yang selaras sehingga akan terwujudnya efektif dalam mencapai dari tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Warungbambu Dadang Sonjaya beliau mengatakan bahwa :

“Kemampuan masyarakat desa warungbambu masih terbatas belum mempunyai kemampuan mengelola bumdes secara professional dan mandiri, karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan potensi desa yang berbeda ini merupakan salah satu dari kelemahan dari kebijakan pelaksanaan BUM Desa di Kabupaten Karawang setiap Desa memiliki karakteristik yang berbeda dan permasalahan di masyarakat yang kompleksitas”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara adaptasi dalam efektivitas pengelolaan BUM Desa berbasis ekonomi kerakyatan masyarakat Desa Warungbambu belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUM Desa karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUM Desa dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUM Desa.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan :

Berdasarkan hasil temuan Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Di Desa Warungbambu bahwa pemerintah Desa Warungbambu dan masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUM Desa. Dengan

demikian dalam pencapaian tujuan efektifitas pengelolaan BUM Desa masih belum efektif dan efisien.

b. Integrasi :

Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Warungbambu pemerintah dan masyarakat membentuk forum musyawarah untuk membentuk BUM Desa tetapi terbatas kepada Kepala Dusun tidak melibatkan secara luas masyarakat desa. Masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas tahapan-tahapan dalam pembentukan BUM Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUM Desa menimbulkan konflik baru dan disintegrasi di tengah masyarakat.

c. Adaptasi :

Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Warungbambu belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUM Desa karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUM Desa dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eko, Suntoro, dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta : ACCESS.

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif .Jakarta selatan: Salemba Humanika.

Hutomo Mardiyatmo, 2003. Konsep Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Salemba Humanika.

Masry Simbolon Maringan. 2004. Dasar- dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Moelong. Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mohamad Jafar Hafsah. 2008. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Iris Press (Institute for Religious and Institutional Studies).

Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Risadi, Aris Ahmad. 2012. Badan Usaha MilikDesa. Jakarta : Dapur Buku. Setiawan, Danny.2011. Wajah Desa Kita Dimensi SDM, Politik, Ekonomi. Jakarta Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.

Soekanto, Soerjono.2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Soejito, Irawan. 1984. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta:Bina Aksara.

Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta.

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa